

Akibat Hukum Surat Kuasa Istimewa Legalisasi pada Proses Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kalianda = Legal Consequences Letters of Special Power of Power Legalization in the Case of Process Divorce in a Religious Court of Kalianda

Neyditama Sakni Suryaputra, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920527579&lokasi=lokal>

Abstrak

Surat kuasa pada perkara perceraian harus sesuai dengan peraturan hukum acara yang berlaku, karena peraturan hukum acara tidak boleh ditafsirkan lain oleh majelis hakim. Praktik penggunaan Surat Kuasa Istimewa dalam bentuk Akta Dibawah Tangan Masih marak terjadi, walaupun praktik seperti itu tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1796 KUHPdt jo. Pasal 123 HIR/147 Rbg. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan penggunaan Surat Kuasa Istimewa legalisasi pada proses perkara perceraian di Pengadilan Agama dan akibat hukum penggunaan surat kuasa istimewa legalisasi pada proses perceraian di Pengadilan Agama. Bentuk penelitian ini adalah yuridis empiris. Tipe penelitian ini berbentuk evaluatif dan metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, lalu hasil penelitian ini diolah secara sistematis dan kualitatif agar menghasilkan penelitian yang preskriptif dan sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan hukum dari pemberian kuasa melalui surat kuasa dikaitkan dengan pelaksanaan peraturan tersebut pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kalianda dan memberikan solusi atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Urgensi dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan antara peraturan hukum tentang surat kuasa dengan pelaksanaan surat kuasa yang digunakan pada proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Kalianda. Hasil penelitian disimpulkan : 1) Pelaksanaan perwakilan pada proses Mediasi dan Ikrar Talak perkara Perceraian menggunakan Surat Kuasa Istimewa dalam bentuk akta dibawah tangan yang didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama, atau waarmeding/legalisasi oleh notaris. 2) Surat Kuasa yang digunakan pada proses Mediasi dan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Kalianda tidak sesuai dengan Ketentuan khusus diatas dan berakibat hukum surat kuasa istimewa tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar perwakilan pada proses Mediasi dan Ikrar Talak. Serta dapat mengakibatkan tidak sahnya perwakilan pada mediasi dan ikrar talak sehingga dapat dianggap perbuatan tersebut tidak sah dan Putusan/Penetapan Cerai dapat dibatalkan oleh putusan tingkatan Banding, Kasasi, ataupun Peninjauan Kembali.

.....The power of attorney in divorce cases must be under the applicable procedural law regulations because procedural law regulations must not be interpreted otherwise by the panel of judges. The practice of using a Special Power of Attorney in the form of an Underhand Deed is still rife, although such a practice is not by the provisions of Article 1796 of the Indonesian Civil Code. Article 123 HIR/147 Rbg. The purpose of this study is to analyze the implementation of the use of a legalization Special Power of Attorney in the divorce case process in the Religious Court and the legal consequences of using a legalization special power of attorney in the divorce process in the Religious Court. This form of research is empirical juridical. This type of research is evaluative and the data analysis method used in this study is qualitative, then the results of this research are processed systematically and qualitatively in order to produce prescriptive research and so as to identify legal problems from granting power of attorney through power of attorney associated with the implementation of the regulation in divorce cases at the Kalianda Religious Court and provide solutions to

the Supreme Court Regulations of the Republic of Indonesia. The urgency of this study is that there is a difference between the legal regulations regarding power of attorney and the implementation of power of attorney used in divorce proceedings at the Kalianda Religious Court. The results of the study concluded: 1) The implementation of representation in the process of Mediation and Pledge of Talaq for Divorce cases using a Special Power of Attorney in the form of a deed underhand registered with the clerk of the Religious Court and signed by the Registrar of the Religious Court, or *waarmerking* / legalization by a notary. 2) The Power of Attorney used in the Mediation and Talaq Pledge process at the Kalianda Religious Court is not in accordance with the above special provisions and consequently the special power of attorney cannot be used as a basis for representation in the Mediation and Talaq Pledge process. And can result in the invalidity of representation at mediation and talaq pledges so that it can be considered invalid and the Divorce Decision/Determination can be annulled by an appeal, cassation, or judicial review decision.